



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85901328
E-mail: sekretariat.sesma@bpkp.go.id, *Website*: www.bpkp.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: KP.00.01/PENG-5/SU/02/2022

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengundang Putra/Putri terbaik Indonesia untuk menjadi ASN yang akan ditugaskan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. JUMLAH KEBUTUHAN ASN

1. Formasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2022, BPKP memperoleh alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kualifikasi	Alokasi
1.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ekonomi/ S-1 Hukum/ S-1 Pengadaan	34
2.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ilmu Komunikasi/ S-1 Manajemen Komunikasi/ S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/ S-1 Sosiologi/ S-1 Sosiatri/ S-1 Administrasi/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Ilmu Manajemen/ S-1 Kebijakan Publik/ S-1 Studi Pembangunan/ S-1 Kesehatan Masyarakat/ S-1 Lingkungan Hidup/ S-1 Komunikasi Islam	1
3.	Ahli Pertama – Pengembang Teknologi Pembelajaran	S-1 Pendidikan/S-1 Teknologi Informasi/ S-1 Komunikasi/ S-1 Komputer/ S-1 Multimedia	8

No	Nama Jabatan	Kualifikasi	Alokasi
4.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	D-IV Komunikasi Informasi Publik/ S-1 Komunikasi	5
5.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Komputer/ S-1 Teknik Informatika/S-1 Sistem Informasi	9
6.	Terampil – Pranata Hubungan Masyarakat	D-III Komunikasi	8
JUMLAH			65

C. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
11. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol);
12. Bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan persyaratan nomor 11;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BPKP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/Surat Keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
15. Bagi pelamar formasi Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-I.

D. KETENTUAN TAHAPAN PELAMARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023;
2. Pelamar wajib mengisi kelengkapan formulir pendaftaran dan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan;
3. Setiap Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu kategori formasi dan satu kategori jabatan;
4. Berkas lamaran yang harus diunggah, antara lain:
 - a. Pasfoto format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Surat Lamaran kepada Kepala BPKP (format sebagaimana pada Lampiran I) yang diketik dan sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai;
 - d. Surat Pernyataan (format sebagaimana pada Lampiran II) yang diketik dan sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai;
 - e. Ijazah asli pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. Transkrip Nilai;
 - g. Surat Keterangan Pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja relevan dengan jabatan Fungsional yang dilamar, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
 - h. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-I (khusus untuk pelamar formasi Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa); dan
 - i. Surat Keterangan Disabilitas dan Video aktivitas sehari-hari (khusus untuk pelamar penyandang disabilitas).

E. TAHAPAN SELEKSI DAN PENILAIAN

Tahapan seleksi penerimaan meliputi:

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah Pelamar dengan persyaratan sesuai jabatan yang dilamar.

2. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT)

BKN, terdiri dari:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
- d. Seleksi Wawancara.

3. Nilai ambang batas seleksi kompetensi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022, yaitu:

NO	JABATAN	KOMPETENSI		
		Teknis	Manajerial dan Sosial Kultural	Wawancara
1	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	293	130	24
2	Ahli Pertama – Pengembang Teknologi Pembelajaran	270	130	24
3	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	225	130	24
4	Ahli Pertama - Pranata Komputer	293	130	24
5	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	225	130	24

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Rencana jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
6	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
12	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
13	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
14	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023

*Jadwal dapat berubah sesuai kondisi

2. Waktu dan tempat pelaksanaan setiap tahapan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman www.bpkp.go.id dan media sosial resmi BPKP (*Instagram, facebook, dan twitter*);
3. Perubahan jadwal pelaksanaan tahapan seleksi penerimaan PPPK akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman www.bpkp.go.id dan media sosial resmi BPKP (*Instagram, facebook, dan twitter*).

G. LAIN-LAIN

1. Proses pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi **tidak dipungut biaya**.
2. BPKP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan BPKP dan/atau Panitia Penerimaan PPPK BPKP dan/atau instansi/panitia lain yang berhubungan dengan seleksi ini.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Apabila diketahui melakukan hal tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
5. Peserta yang tidak hadir dalam tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur.

6. Diharapkan agar Pelamar tetap mencari informasi kegiatan seleksi secara rutin melalui laman dan media sosial resmi BPKP.
7. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Pelamar dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi menjadi tanggungan Pelamar.
8. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK di lingkungan BPKP, BPKP berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Keputusan Tim Seleksi PPPK BPKP Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Pertanyaan terkait dengan proses seleksi PPPK BPKP hanya dilakukan melalui alamat surel penerimaan.pegawai@bpkp.go.id atau media sosial resmi BPKP.
11. Pengaduan pelaksanaan seleksi PPPK BPKP melalui alamat wbs.bpkp.go.id.

20 Desember 2022
Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Seleksi

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ernadh Sudarmanto